



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang	: IV
Rapat	: Ke-4
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/Tanggal	: Rabu, 29 Maret 2023
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara	: Dalam rangka untuk mendapat masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN).
Ketua Rapat	: Wahyu Sanjaya, S.E.,M.M.
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E.,M.Si
Hadir Pimpinan	: 3 dari 3 orang Pimpinan BAKN DPR RI yaitu : 1. Wahyu Sanjaya, S.E.,M.M. 2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno 3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.
Hadir Anggota	: 5 dari 9 orang Anggota BAKN DPR RI yaitu : 1. Wahyu Sanjaya, S.E.,M.M. 2. Prof. Dr. Hendrawan Supratikno 3. Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si. 4. Ir. Irwan A. Hasman 5. Dr. H. M. Amir Uskara, M.KES.
Hadir Tamu	: 1. Dr. Toto Pranoto 2. Prof.Dr.Ir.R. Nunung Nuryartono, M.Si 3. Faisal H. Basri, S.E., M.A.
Peserta	: Tenaga Ahli BAKN DPR RI dan Sekretariat

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dibuka pada pukul 14.00 WIB, dipimpin oleh Ketua BAKN, Bapak Wahyu Sanjaya, S.E.,M.M.dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada hari ini adalah Dalam rangka untuk mendapat masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN).
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Dr. Toto Pranoto, Prof.Dr.Ir.R. Nunung Nuryartono, M.Si, dan Faisal H. Basri, S.E., M.A. sebagai narasumber untuk menyampaikan paparan terkait dengan tema rapat dengar pendapat umum yang dimaksud.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini.

II. CATATAN RAPAT/POKOK-POKOK PEMBAHASAN:

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAKN DPR RI Dalam rangka untuk mendapat masukan terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI atas Penyertaan Modal Negara (PMN), beberapa hal yang menjadi pokok bahasan, sebagai berikut :

1. Dr. Toto Pranoto sebagai narasumber menyampaikan paparan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yaitu :
 - ✓ UU BUMN No.19 tahun 2003 pasal 2, menyatakan bahwa tujuan BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional, mengejar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum, menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha serta turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan pada ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
 - ✓ Pembiayaan investasi mengalami kenaikan rata-rata 33% per tahun dalam lima tahun terakhir. Pembiayaan investasi dalam rangka program PEN, PMN, investasi untuk LPI/INA guna mendukung pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi. Pertumbuhan PMN rata-rata 46% per tahun dalam lima tahun terakhir.
 - ✓ Realisasi PMN pada tahun 2017-2021 dengan 5 penerima tertinggi yaitu PT Utama Karya 27.708 miliar, PT BPUI 26.268 miliar, LPEI 21.698 miliar, PT PLN 16.500 miliar, PT LPI 15.000 miliar.
 - ✓ Total Investasi Pemerintah dalam bentuk PMN dan kepada BUMN dan BLU periode 2005-2021 Total Rp695,6 Triliun dengan nilai sebesar PMN BUMN: Rp361,3 Triliun (52%) PMN BLU sebesar Rp334,3 Triliun (48%). Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN di tahun 2022 sebesar Rp72,4 triliun.
 - ✓ Kontribusi pajak BUMN terhadap pendapatan negara mengalami peningkatan signifikan sampai di tahun 2020 kemudian menurun di tahun 2021 akibat pemulihan pandemi, sementara kontribusi dividen selama lima tahun terakhir relatif stagnan. PNBPN sempat meningkat sebelum periode pandemi, kemudian sampai tahun 2021 belum pulih. Nilai PMN meningkat signifikan di tahun 2021, mencapai sekitar 4,5% dari pendapatan negara.

- ✓ Secara umum, aset BUMN mengalami penurunan secara relatif selama lima tahun terakhir. Pendapatan sempat mengalami penurunan pada periode pandemi, kemudian relatif tumbuh pesat. Namun, rasio laba bersih terhadap PDB relatif stagnan di kisaran 0,2% - 1,0 %
 - ✓ Sekitar 80% dari total kontribusi pendapatan BUMN hanya disumbangkan oleh sekitar 20% dari total perusahaan yang disebut kondisi Pareto.
 - ✓ Investasi pemerintah kepada BUMN, dalam bentuk PMN ataupun dukungan pendanaan lainnya tumbuh pesat dalam 5 tahun terakhir, didorong oleh kebutuhan proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi dan penguatan keuangan perusahaan dalam menjalankan mandat pemerintah.
 - ✓ Secara umum, kontribusi BUMN terhadap pemerintah melalui pajak dan dividen meningkat namun belum sebesar investasi pemerintah yang masif dalam beberapa tahun ini. Selain itu, kinerja BUMN masih menunjukkan tantangan dalam meningkatkan profitabilitas dan pareto BUMN.
 - ✓ Dukungan pendanaan pemerintah kepada BUMN juga dilakukan di berbagai negara lainnya, dari hasil benchmark pendanaan pemerintah umumnya dilakukan guna memperkuat struktur keuangan perusahaan. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan ke depan.
 - ✓ Diperlukan pengembangan mekanisme pengelolaan PMN yang lebih baik ke depan, salah satunya meningkatkan sistem pengelolaan kinerja terhadap PMN dan investasi pemerintah kepada BUMN melalui KPI yang berorientasi tidak hanya pada sasaran keuangan tetapi outcome yang riil dari pencapaian proyek strategis atau mandat BUMN tertentu.
2. Prof.Dr.Ir.R. Nunung Nuryartono, M.Si sebagai narasumber menyampaikan paparan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yaitu :
- ❖ Perkembangan nilai PMN dari tahun 2016 ke tahun 2022 dengan nilai tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp113,34 triliun.
 - ❖ Tujuan penggunaan tambahan PMN Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER 1/MBU/03/2021 adalah untuk penugasan pemerintah kepada BUMN, Restrukturisasi dan/atau penyelamatan BUMN Pengembangan usaha BUMN.
 - ❖ PMN bersama dengan pengeluaran investasi dan kebijakan Pemerintah lainnya bertujuan untuk mendorong pembangunan nasional, meningkatkan kualitas layanan publik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan kesejahteraan rakyat. PMN memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung, dampak finansial dan ekonomi serta dampak sosial (penurunan kemiskinan).
 - ❖ Pemberian tambahan PMN tidak memberikan efek secara instan terhadap peningkatan produksi. Hal ini dikarenakan PMN merupakan investasi jangka panjang, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk melihat manfaat yang ditimbulkan dari penggunaan dana PMN.

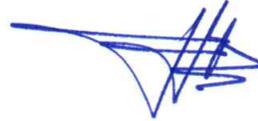
- ❖ Diperlukan strategi dan perbaikan pengelolaan internal BUMN seperti efisiensi bahan baku dan manajerial serta pemanfaatan teknologi setelah diberikannya PMN tidak hanya digunakan untuk menutupi utang tanpa adanya perbaikan maupun investasi untuk masa depan.
 - ❖ Dalam menilai dampak PMN diperlukan kehati-hatian karena dampak secara finansial berbeda dengan dampak ekonomi, dampak sosial yaitu kemiskinan pedesaan yang belum berkurang secara optimal, dampak eksternalitas perlu menjadi perhatian.
 - ❖ Impact PMN khususnya bagi PLN diharapkan dapat meningkatkan Capital Stock di sektor Listrik, Sektor Bangunan serta Instalasi Listrik melalui peningkatan produksi. Peningkatan produksi dapat dilaksanakan dengan peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan input dari komoditas lain. Selain dampak peningkatan produksi, diharapkan adanya dampak secara makroekonomi diantaranya kenaikan PDB, kenaikan ekspor secara agregat, dan kenaikan penerimaan pemerintah.
 - ❖ Dampak pemberian PMN bagi PT PLN (development impact) adalah meningkatkan pendapatan kelompok rumah tangga Bukan Pertanian Pedesaan dan Rumah Tangga Bukan Pertanian.
 - ❖ Dampak ekonomi pemberian PMN bagi PMN BUMN yaitu pada sektor BUMN dengan multiplier effect terbesar yaitu 1) sektor industri pengolahan, 2) pengadaan listrik dan gas, serta 3) pertanian, kehutanan dan perikanan.
3. Faisal H. Basri, S.E., M.A. sebagai narasumber menyampaikan paparan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) yaitu :
- Dasar PMN di Indonesia adalah adanya upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur melalui BUMN dinilai dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu upaya untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui BUMN adalah dengan pemberian PMN pada BUMN sektor infrastruktur.
 - PT Utama Karya merupakan salah satu penerima PMN terbesar dengan nilai PMN selama periode 2015-2021 sebesar Rp52,30 triliun. PT Utama Karya dengan nilai DER kecil dinilai tidak dapat mengajukan hutang dalam jumlah yang besar. Akan tetapi melalui PMN, PT Utama Karya melakukan proyek infrastruktur melalui penugasan dari pemerintah.
 - Nilai investasi pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN dan BLU periode 2005-2011 sebesar Rp695,6 Triliun dengan total PMN BUMN Rp361,2 Triliun dan Rp334,3 Triliun pada PMN BLU.
 - Nilai PMN yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya seharusnya memperhatikan faktor-faktor seperti memperhatikan Tax Rasio. Data dari Kementerian Keuangan dan BPS menunjukkan bahwa tax ratio mengalami penurunan cukup signifikan dari tahun 2008 sebesar 13,3 menjadi 9,6 pada tahun 2023.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 29 Maret 2023

**a.n. PIMPINAN
KABAGSET BAKN,**



Mardi Harjo, SE., M.Si.
NIP. 19700915 1998 03 1006 h